

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Sosialisasi**

Membahas tentang sosialisasi politik adalah sosialisasi kebijakan, karena pembahasan yang dimaksud politik ada keterkaitannya mengenai kebijakan. Maka yang dimaksud sosialisasi politik yang dibahas dalam penelitian ini mencakup tentang segala urusan terkait kebijakan.

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Sosial politik merupakan proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut dapat menentukan tanggapannya.

Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem - sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Pengertian sosialisasi menurut Sutaryo adalah:

“Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain.” (Sutaryo,2005:156)

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti

belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L. Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat (Sutaryo,2005:156).

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan mengenai sosialisasi yang terletak pada objeknya yaitu masyarakat yang di lihat dari sudut hubungan antara manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Sosialisasi juga terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak ingin berkerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik. Mengenai hubungan sosialisasi dengan politik terletak pada objek dari sosialisasi, dapat diartikan bahwa pengertian sosialisasi kebijakan sama dengan pengertian dari sosialisasi politik.

Menurut Adibowo (2017) menjelaskan bahwa bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan menggunakan media informasi visual dan cetak melalui berbagai kegiatan dan program. Media informasi cetak ialah berupa pamflet yang dapat disebarakan kepada masyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan mengenai apa yang Adibowo sampaikan mengenai sosialisasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana regulasi yang disampaikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Dapat diketahui apabila peraturan tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi melalui media-media yang telah disediakan. Selain itu juga,

pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan cara mengunjungi instansi maupun masyarakat yang terlibat dengan peraturan yang belum optimal.

### **2.1.1.1 Jenis Sosialisasi**

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Susanto membagi jenis sosialisasi menjadi dua, yaitu:

1. “Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak.
2. Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.”  
(Susanto, 1992:32)

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam keduanya institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dan jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan dan diatur secara formal.

Jenis-jenis sosialisasi berdasarkan tipenya menurut Syahril Syarbaini dkk, terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) “Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- 2) Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi.”  
(Syarbaini dkk, 2004:73)

Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintahan, disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan karena mempunyai landasan hukum dan materi yang disampaikan merupakan kebijakan pemerintah. Sosialisasi yang bersifat informal lebih sering dilakukan tanpa disadari.

Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat.

### **2.1.1.2 Syarat Terjadinya Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat yaitu:

1. “Pertama, memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
2. Kedua, memungkinkan lestarnya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja hingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.”  
(Susanto,1992:39)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa melalui sosialisasi masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya. Selain itu, dapat faktor lain yang menunjang proses sosialisasi yaitu faktor lingkungan, dimana di dalamnya interaksi sosial. Selain faktor lingkungan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi, diantaranya adalah:

- a. “Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai - nilai, norma - norma dan peran.
- b. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
- c. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu dan kelompok.”  
(Susanto, 1992:45)

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Michael Rush & Phillip Althoff bahwa setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor

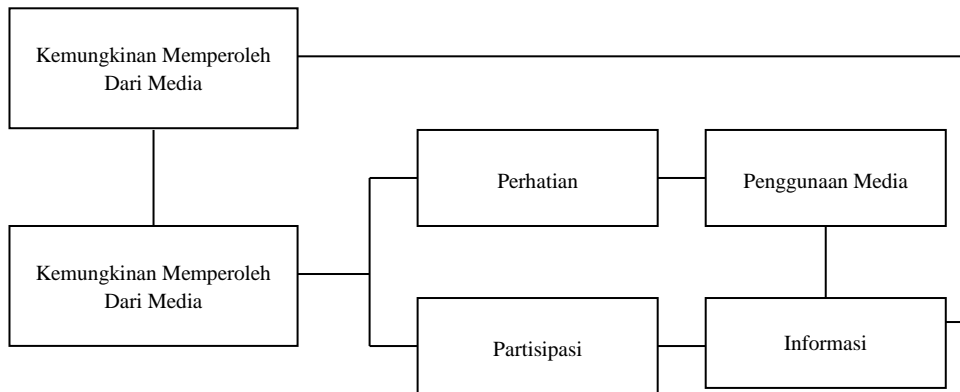
lingkungan dan keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Adapun unsur-unsur keberhasilan proses sosialisasi politik yaitu:

1. “Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan media masa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama, selain itu, keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat memberi pengaruh sebagai agen sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat.
2. Materi sosialisasi politik, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat.
3. Mekanisme sosialisasi politik, di bagi menjadi 3 yaitu imitasi, intruksi, motivasi.
4. Pola sosialisasi politik diilustrasikan dalam sebuah gambar.”  
(Rush dan Althoff, 2002: 37)

Agen sosialisasi merupakan peran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam materi sosialisasi. Keberhasilan terdapat ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Apabila proses-proses tersebut dapat tersusun maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi dapat dengan tepat disampaikan kesasaran sosialisasi.

Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Terdapat empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media masa dan lembaga pendidikan sekolah. Akan tetapi media dalam proses sosialisasi merupakan sarana tambahan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Lane bahwa dasar sosialisasi dalam keluarga dan peran media masa hanyalah bersifat tambahan (Susanto, 1992:163). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Peranan Media Dalam Proses Sosialisasi.**



(Sumber: Susanto, 1992:163).

Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi bernilai dan tidak samanya sejalan satu sama lain, contohnya apa yang diajarkan keluarga mungkin saja berbeda dan dapat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agen sosialisasi yang lain, tetapi yang menerima pesan dapat dengan leluasa mempelajarinya dari teman-teman sebaya dan media masa.

Selain itu, menurut Silvana (2013) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa media massa mempunyai fungsi ideal yaitu memberikan informasi dari realitas yang terjadi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi pada kenyataannya media massa dipengaruhi faktor-faktor eksternal dalam melaksanakan fungsi idealnya. Sehingga media massa tersebut harus dapat memposisikan diri sebagai pihak yang netral dan obyektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh khalayak. Selain faktor-faktor eksternal media juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang mengakibatkan media massa tidak leluasa dalam memberikan informasi kepada khalayak.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Silvana mengenai media massa dapat ditarik kesimpulan bahwa media massa terbilang penting karena mempunyai fungsi yang ideal, namun pada realita saat ini media massa pun masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan media massa tidak leluasa memberikan informasi kepada masyarakat.

Materi sosialisasi merupakan isi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Pada dasarnya, materi sosialisasi harus mengandung nilai-nilai dan norma-norma. Adapun pengertian dari nilai dan norma menurut Hasan Mustafa adalah:

“Nilai adalah prinsip - prinsip etika yang dipegang dengan kuat oleh individu atau kelompok sehingga mengikatnya dan sangat berpengaruh pada perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap anggota suatu unit sosial sehingga ada sanksi negatif dan positif.” (Mustafa, 1995:112)

Selain kedua unsur tersebut, dalam materi sosialisasi politik harus mengandung peran. Peran adalah seperangkat harapan atau tuntutan kepada seseorang untuk menampilkan perilaku tertentu karena orang tersebut menduduki suatu status sosial tertentu, jadi peran materi sosialisasi harus mengandung peran yang berupa pengetahuan.

Pengetahuan secara mendasar sifatnya adalah faktual (walaupun tidak eksklusif), pengetahuan dapat mendahului pembentukan nilai-nilai dan sikap-sikap begitupun sebaliknya. Pengetahuan dapat digunakan untuk mendukung suatu nilai khusus atau suatu sikap setelah nilai dan sikap terbentuk, selain itu pengetahuan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sikap-sikap. Sikap-sikap berkaitan dengan nilai-nilai dalam makna kepercayaan individu dapat memainkan peranan yang penting dalam penentuan reaksi terhadap rangsangan khusus dan terhadap pembentukan

sikap-sikap ataupun pendapat-pendapat khusus, akan tetapi sikap-sikap dapat mendahului nilai-nilai khususnya yang berlangsung pada dasar sosialisasi politik, nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:

- 1) “Tradisi; terutama agama, tetapi juga termasuk ikatan-ikatan kekeluargaan dan tradisi pada umumnya.
- 2) Prestasi; ketekunan, pencapaian atau perolehan, ganjaran-ganjaran material, mobilitas sosial.
- 3) Pribadi; kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kemurahan hati
- 4) Penyesuaian diri; bergaul dengan baik, menjauhkan diri dari kericuhan, menjaga keamanan dan kententraman.
- 5) Intelektual; belajar dan pengetahuan sebagai tujuan
- 6) Politik; sikap-sikap dan kepercayaan berkaitan dengan pemerintahan.”  
(Syarbaini dkk, 2004:71)

Proses sosialisasi saling berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki setiap masyarakat sebagai objek sosialisasi karena nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi sikap-sikap masyarakat terhadap hal-hal yang baru muncul di lingkungannya.

Mekanisme sosialisasi dalam mentransmisikan elemen-elemen dari sosialisasi melalui beberapa cara:

1. “Imitasi adalah merupakan peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain dan merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak.
2. Intruksi adalah lebih kurang merupakan peristiwa penjelasan dari, sungguhpun harus ditekankan bahwa hal itu tidak perlu hanya terbatas pada proses belajar formal.
3. Motivasi adalah bentuk tingkah laku yang tepat atau cocok yang dipelajari melalui proses coba-coba dan gagal individu yang bersangkutan secara langsung belajar dari pengalaman mengenai tindakan sama cocok dengan sikap dan pendapat sendiri.”  
(Rush dan Allthof, 2002:40).

Cara imitasi lebih cocok diterapkan dalam sosialisasi untuk masa kanak-kanak. Intruksi lebih banyak dilakukan pada proses pembelajaran formal. Imitasi



dan intruksi merupakan tipe-tipe khusus dari pengalaman, akan tetapi motivasi lebih banyak diidentifikasi dengan pengalaman.

Pola sosialisasi adalah proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi diantara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman yang relevan. Oleh karena itu, untuk mempermudah hasil proses sosialisasi dibentuklah pola sosialisasi yang diilustrasikan dalam sebuah gambar. Pembuatan pola tersebut dilakukan setelah proses sosialisasi berjalan yang akan berkaitan dengan unsur-unsur sebelumnya.

Lebih lanjut Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa dari segi penyampaian pesan sosialisasi politik di bagi 2 yaitu:

1. "Pendidikan politik, merupakan suatu proses dialogika diantara pemberi dan penerima pesan melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah pemerintahan dan partai politik.
2. Indoktrinasi politik, proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai. Norma dan simbol yang dianggap pihak yang bersangkutan, sebagai ideal dan baik, melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksa psikologis dan latihan yang penuh disiplin."  
(Surbakti, 1992:117-118).

Salah satu dari agen sosialisasi politik dapat kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai tujuan untuk memobilisasi masa dengan cara memberikan pendidikan tentang politik mengenai nilai-nilai dan norma-norma politik. Harapan dari kelompok kepentingan adalah timbal balik dari warga masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan politik untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung pergerakan politik dan tujuan utama dari kelompok kepentingan.

### **2.1.2 Kebijakan**

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak, pengertian umum dari kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan secara formal oleh organisasi atau instansi, yang sifatnya mengikat, dan mengatur perilaku seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menciptakan kepatuhan dalam masyarakat dan kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu di pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi Pengertian Kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya.

Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting, hal ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan terjamin. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik di implementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh

pemerintah sesuai yang telah ditugaskan, pelaksanaan tugas yang telah diberikan pun harus mampu dilakukan dengan baik dan juga benar agar hal tersebut tidak merugikan pemerintahan.

Pengertian kebijakan menurut Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa :

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Berdasarkan pengertian atas, kebijakan itu ialah peraturan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki kapasitas pada bidang tertentu yang akhirnya dibuat oleh pemerintah atau kelompok dalam ruang lingkup tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan demi mensejahterakan masyarakat dan kebijakan ini sifatnya mengikat atau wajib untuk dilaksanakan, apabila bertentangan dan dilanggar kebijakan tersebut bukan tidak mungkin adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Semua itu merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi malah-masalah publik yang sedang terjadi.

David Easton memiliki pandangan mengenai apa itu kebijakan pemerintah yang dikutip oleh Lubis bahwa :

“Menurut David Easton kebijakan pemerintah itu sebagai “kewenangan untuk mengalokasi nilai-nilai” bagi masyarakat secara menyeluruh. Berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat, ialah pemerintah, bukan lembaga yang lain. Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara keseluruhan kepada anggota masyarakat oleh sesuatu pemerintah yang sah. Jika dipergunakan bahasa-bahasa GBHN untuk membuktikan statement Easton itu kita jumpai istilah:

- a. Pembangunan untuk membangun manusia seutuhnya meliputi, pembinaan proses jasmani dan rohani
- b. Pembangunan itu untuk seluruh masyarakat

c. Berlakunya asas adil dan merata  
Dan lain-lain.” (Easton dalam Lubis, 2007:8)

Menurut pemaparan yang diberikan oleh David Easton, kebijakan pemerintah ialah suatu kewenangan yang dibuat melalui nilai-nilai untuk masyarakat secara menyeluruh atau merata untuk semuanya. Semua itu menjadikan pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang mengatur seluruh kepentingan dari masyarakat itu sendiri, tidak ada lembaga lain yang bisa mengatur masyarakat. Pengalokasian nilai-nilainya secara keseluruhan ditunjukkan kepada masyarakat oleh pemerintahan yang sah. Ada beberapa istilah yang dapat membuktikan *statement* atau pernyataan dari Easton ini antara lain; pertama, pembangunan untuk membangun manusia seutuhnya meliputi, pembinaan proses jasmani dan rohani, maksud dari pernyataan Easton ini ialah memberdayakan masyarakat agar menjadi masyarakat madani yang selalu berfikir positif akibat terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dari masyarakat itu sendiri; kedua, pembangunan untuk seluruh masyarakat, maksudnya ialah segala sesuatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah secara tidak langsung hasil atau sasaran itu semua untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali; ketiga, berlakunya asas adil dan merata, maksudnya ialah kebijakan itu semua sudah dibuat secara matang agar dapat adil dan merata untuk semua masyarakat, tidak ada yang dapat kebal atau tidak menjadi sasaran dari kebijakan tersebut apapun kedudukan yang dimilikinya.

Sedangkan Subarsono menulis dalam bukunya bahwa menurut Thomas Dye (1981:1) bahwa :

“Definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah dan

bukan swasta; kebijakan publik itu menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.” (Thomas Dye dalam Subarsono, 2005:2)

Menurut pernyataan dari Thomas Dye yang ditulis oleh Subarsono bahwa definisi kebijakan publik itu merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada ruang lingkup tertentu dan semua yang terlibat atau yang berada didalamnya harus mengikuti peraturan tersebut. Kebijakan tersebut bermakna bahwa kebijakan itu dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mewakili pemerintah dan bukan pihak swasta. Pihak swasta juga dapat membuat kebijakan, namun kebijakan tersebut hanya untuk orang yang berada pada jangkauan pihak swasta tersebut, tidak untuk konsumsi publik yang mana semua masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan pihak swasta tersebut tidak diharuskan untuk melakukan apa yang diperintahkan, nyatanya jika melanggarpun tidak akan mendapatkan sanksi dari pihak swasta tersebut. Tetapi jika yang membuat keputusan itu pemerintah itu sendiri bukan tidak mungkin seluruh masyarakat baik itu pihak swasta pun diharuskan untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang kebijakan itu katakan.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Soeharto, 2008). Sebagai suatu keputusan yang mengikat orang banyak maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik atau bisa disebut juga pemerintah yang memegang kuasa, yakni mereka akan secara sadar untuk menerima kebijakan tersebut dari publik atau masyarakat, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi membangun

kesejahteraan atau kepentingan rakyat itu sendiri. Walaupun pemerintah itu sendiri yang membuat kebijakan tersebut, orang-orang yang ada atau pun orang yang membuat kebijakan tersebut diharuskan untuk mengikuti atau mentaati apa yang ada dikebijakan tersebut entah itu melakukan atau tidak melakukan.

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Di era globalisasi ini fokus utama dari kebijakan publik adalah pelayanan publik, yang mana merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan, meningkatkan kualitas kehidupan atau kesejahteraan masyarakat.

Menurut Young dan Quinn (2002) ditulis dalam Suharto (2008:44) terdapat beberapa konsep dalam kebijakan publik, yakni sebagai berikut :

- 1) “Kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik dalam hal ini merupakan tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- 2) Kebijakan publik sebagai sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik ini berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkret yang berkembang di masyarakat.
- 3) Kebijakan publik sebagai seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik bukanlah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan atau tindakan strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- 4) Kebijakan publik sebagai sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.
- 5) Kebijakan publik sebagai justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik ini biasanya berisi sebuah pernyataan terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Perumusan keputusan ini dibuat oleh badan pemerintah maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.”  
(Young dan Quinn dalam Suharto, 2008:44)

Dari beberapa konsep yang dijelaskan oleh Young dan Quinn yang ditulis oleh Suharto bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukan itu semua. Kebijakan publik ini juga bisa sebagai reaksi terhadap kebutuhan dan masalah yang terjadi dimasyarakat, kebijakan ini muncul akibat dari pemerintahan yang merespon masalah atau kebutuhan kongkret yang ada dimasyarakat.

Kebijakan publik dapat sebut sebagai tindakan yang berorientasi untuk suatu tujuan, yang mana kebijakan ini dibuat bukan untuk kepentingan pribadi seseorang atau kelompok yang membuatnya, itu semua atas dasar dari beberapa pilihan atau strategi khusus yang dibuat untuk tujuan tertentu dan demi kepentingan orang banyak atau pemerintah membuat kebijakan itu diatas kertas hanya untuk mensejahterakan masyarakatnya bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu yang memiliki kuasa.

Kebijakan publik umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial yang ada dijalan atau masyarakat. Cara kerja dari kebijakan publik itu sangat simpel dan mudah dimana merupakan sebuah pilihan dalam memilih keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik sebagai justifikasi yang artinya pembenaran suatu keputusan atas dasar beberapa pertimbangan yang sudah pernah dibuktikan sebelumnya dan dibuat oleh seseorang atau beberapa orang yang memiliki wewenang/aktor. Biasanya berisi sebuah pernyataan-pernyataan terhadap langkah-langkah atau rencana suatu tindakan yang telah dirumuskan secara matang agar tidak terjadi kecemburuan

sosial atau tidak merugikan atau menguntungkan satu pihak saja. Perumusan keputusan ini dibuat oleh pemerintah itu sendiri maupun beberapa perwakilan lembaga pemerintahan yang dipercaya oleh pemerintah.

Menurut Kurniati (2016) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang dilakukan setelah formulasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah pelaksanaan kebijakan, dimana implementasi kebijakan ini merupakan kegiatan praktis.

Dapat ditarik kesimpulan dari apa yang Kurniati sampaikan mengenai implementasi kebijakan yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar rancangan kebijakan yang sebelumnya dibuat, implementasi kebijakan pun dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari kebijakan tersebut yang mana implementasi kebijakan ini merupakan aktivitas praktis.

Sejalan dengan itu menurut Kurniasih (2013) dalam jurnalnya menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah konsistensi sikap implementor sejak perencanaan sampai dengan pengawasan mulai tingkat pimpinan puncak sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Menurut apa yang dipaparkan Kurniasih diatas bahwa implementasi kebijakan itu merupakan konsistensinya sikap dari seorang aparatur mulai dari awal perencanaan sampai dengan pengawasan mulai dari tingkat atas pemimpin sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan kebijakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sikap kita sebagai atasan atau bawahan harus tetap konsisten dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan tujuan kebijakan.



## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perhubungan di Kota Bandung. Penyelenggaraan perhubungan mencakup pelanggaran parkir yang mengakibatkan kemacetan pada ruas jalan kota Bandung, selain itu juga kenyamanan dan keamanan jalan raya menjadi sangat terganggu karna masih banyak terjadinya pelanggaran parkir. Sanksi-sanksi yang diberikan oleh petugas Dinas Perhubungan melalui Surat Edaran No.552/SE.098-Dishub tentang Penindakan Terhadap Pelanggaran Parkir Di Kota Bandung masih belum berjalan dengan baik, maka dari itu instansi terkait melakukan tindakan seperti pengembosan ban (cabut pentil), penguncian roda (gembok ban), penempelan *sticker* hingga penderekan mobil atau pengangkutan sepeda motor. Namun setelah diberikannya sanksi-sanksi tersebut, instansi terkait masih harus melakukan sosialisasi karena kemungkinan besar masyarakat tidak dapat menerima sanksi yang diberikan, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang dapat menerima sanksi-sanksi tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, dan dari beberapa teori menurut para ahli diatas, peneliti memilih dan mengambil teori dari Rush dan Althoff yang memiliki empat indikator mengenai kriteria yang diperlukan dalam sebuah proses sosialisasi yaitu agen sosialisasi, materi sosialisasi, mekanisme sosialisasi dan pola sosialisasi.

Alasan peneliti menggunakan teori dari Rush dan Althoff karena menurut pandangan dari peneliti teori tersebut relevan dengan permasalahan yang sering terjadi di Kota Bandung terkait dengan penertiban pelanggaran parkir. Oleh sebab

itu diperlukannya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan tentang penertiban pelanggaran parkir di Kota Bandung. Yang memiliki beberapa kriteria-kriteria khususnya yang dipaparkan oleh Rush dan Althoff, yaitu:

Pertama, agen sosialisasi pada penertiban pelanggaran parkir di Kota Bandung merupakan peran utama dalam keberhasilan suatu proses sosialisasi untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam kebijakan yang dikeluarkan pada surat edaran No.552/SE.098-Dishub tentang Penindakan Terhadap Pelanggaran Parkir Di Kota Bandung. Yang termasuk kedalam agen sosialisasi yaitu:

- a. Media Massa, yaitu agen sosialisasi yang berpengaruh besar karena kualitas dan pesan yang disampaikan mampu merubah pandangan masyarakat tergantung apa yang disampaikan.
- b. Instansi adalah dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.
- c. Organisasi adalah agen dari masyarakat yang mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Walikota kepada setiap elemen masyarakat.

Kedua, materi sosialisasi merupakan isi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi yang dapat mengandung nilai dan pengetahuan. Yang termasuk kedalam materi sosialisasi yaitu:

- a. Nilai-nilai yang terkandung saat disosialisasikan yaitu tentang penyelenggaraan perhubungan yang dilakukan oleh petugas Dinas

Perhubungan Kota Bandung agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

- b. Pengetahuan mengenai penyelenggaraan perhubungan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.

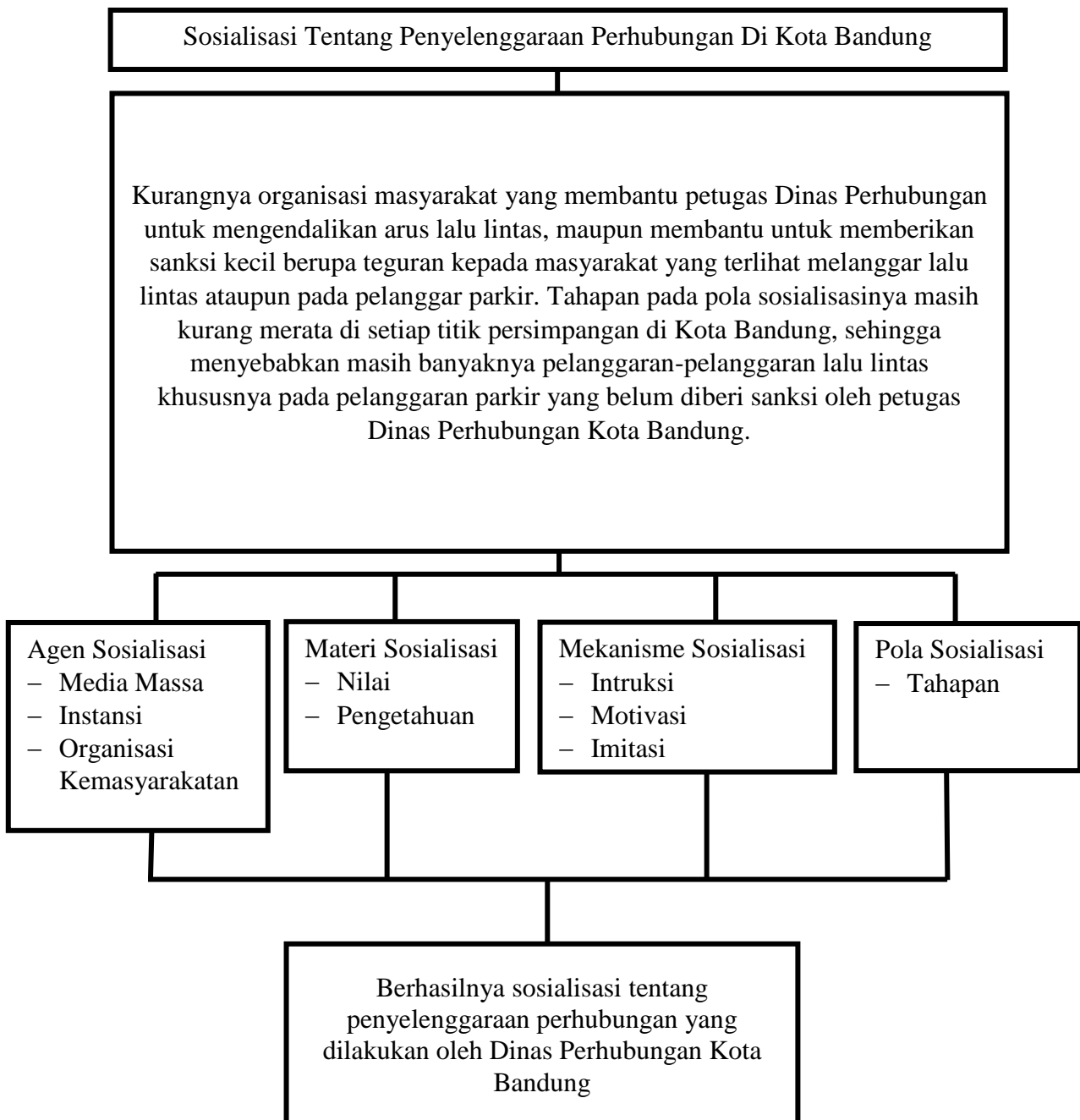
Ketiga, mekanisme sosialisasi adalah cara yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mensosialisasikan disiplin dalam berlalu lintas, yang terdiri dari:

- a. Instruksi adalah perintah dari program yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan agar keamanan, kenyamanan dan ketertiban di Kota Bandung dapat terjaga dengan rapih.
- b. Motivasi (pendorong) adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan bagi petugas Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuannya.
- c. Imitasi adalah tindakan meniru yang dilakukan terus menerus oleh petugas Dinas Perhubungan maupun dari masyarakat yang menciptakan kesadaran akan ketertiban saat parkir.

Keempat, pola sosialisasi adalah suatu proses penyampaian informasi yang terus menerus dan saling berkesinambungan mengenai program yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung yaitu penyelenggaraan perhubungan melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung. Oleh karena itu, dalam keputusan surat edaran yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandung merupakan program yang harus disosialisasikan oleh petugas Dinas Perhubungan demi ketertiban dan kenyamanan umum dapat dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan pada teori, konsep, definisi

operasional dan indikator-indikator yang telah peneliti paparkan, maka kerangka pemikiran ini dapat dilihat dalam model sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Model Kerangka Pemikiran**



(Sumber: Peneliti, 2019)

### **2.3 Proposisi**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka proposisi dari penelitian ini adalah Sosialisasi Tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang ditentukan oleh unsur yaitu agen sosialisasi, materi sosialisasi, mekanisme sosialisasi dan pola sosialisasi.